

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan bagian nyata dari proses demokrasi di Indonesia, masyarakat secara langsung memilih seorang pemimpin daerah, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota (Oktafia Kusuma, 2024). Pilkada bukan hanya kontes demokrasi lokal, tetapi Pilkada merupakan cerminan dari kompleksitas relasi sosial antarkelompok dalam masyarakat multietnis. Artinya, setiap kelompok masyarakat baik mayoritas maupun minoritas memiliki hak suara untuk berpartisipasi secara politik, sehingga diperlukan suatu strategis untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Para calon pemimpin sering melakukan pendekatan kepada etnis-etnis tertentu untuk mendapatkan dukungan suara melalui tim sukses.

Di Indonesia, dengan keragaman suku, bahasa, dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah, identitas etnis kerap menjadi salah satu faktor yang membentuk orientasi pemilih, khususnya dalam konteks pemilihan langsung pasca reformasi (Oktafia Kusuma, 2024). Tidak hanya sebagai penanda budaya, identitas etnis telah bertransformasi menjadi modal politik, dimana kandidat memanfaatkannya untuk membangun kedekatan emosional, sementara pemilih menggunakannya sebagai kerangka referensi dalam menentukan pilihan. Etnis juga berpotensi memengaruhi kesetiaan terhadap partai tertentu karena rasa keterikatan pada suku dan daerah mampu membangkitkan perasaan persaudaraan yang kuat diantara sesama anggota kelompok (Nasution et al., 2024). Kendati demikian, relasi antara identitas etnis

dan perilaku pemilih tidak bersifat deterministik. Penelitian tentang politisasi etnis pada Pemilihan Gubernur Maluku utara menunjukkan bahwa isu kedekatan dan kesamaan etnis yang dihembuskan selama kampanye tidak secara otomatis memengaruhi pilihan elektoral pemilih (Ahmad et al., 2024). Artinya, dukungan sosial berbasis etnis yang tampak kuat pada masa kampanye belum tentu berkonversi menjadi dukungan suara pada hari pemungutan suara, dan hal inilah yang menjadi persoalan sosiologis yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Untuk memahami fenomena tersebut, kajian sosiologi politik menawarkan tiga pendekatan utama dalam menganalisis perilaku pemilih, yaitu sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologis yang dikenal dengan *columbia school* menekankan bahwa individu cenderung berpikir politik sesuai dengan siapa dirinya secara sosial, artinya keanggotaan dalam kelompok etnis, keluarga, dan komunitas membentuk orientasi politiknya secara kolektif (Alwi & Ram, 2024). Kelompok etnis berpengaruh terhadap pilihan pemilih melalui solidaritas dan jaringan sosial, sehingga kandidat yang berhasil masuk ke dalam ruang sosial suatu kelompok akan memperoleh legitimasi simbolik yang kuat (Nur Ainun, Nur Indah, 2022). Hal ini memperlihatkan kita pada sisi bahwa pemilih juga melakukan kalkulasi pragmatis berdasarkan rekam jejak, visi-misi, dan kepentingan konkret. Ketegangan antara solidaritas kelompok dan logika kalkulasi rasional inilah yang dapat menjelaskan mengapa dukungan sosial yang kelihatannya solid tidak selalu berujung pada pilihan yang konsisten di bilik suara.

Selain dua pandangan tersebut, pergeseran level kompetisi politik turut memainkan peran penting dalam perubahan perilaku pemilih. Pada tingkat kabupaten atau kota, pemilih cenderung dipengaruhi oleh kedekatan personal,

kebijakan lokal yang langsung dirasakan, dan rekam jejak kinerja petahana di wilayah terdekatnya. Akan tetapi, ketika kompetisi beralih ke tingkat provinsi, pemilih mulai mempertimbangkan isu-isu yang lebih luas, seperti kapasitas kepemimpinan berskala besar, pembangunan antar wilayah, dan pengelolaan sumber daya di lintas daerah. Pergeseran pertimbangan ini membuka celah bagi perubahan preferensi pemilih termasuk di komunitas yang sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan sosial kepada kandidat tertentu (Annora & Martini, 2026). Inilah konteks struktural yang melatarbelakangi fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Namun, perkembangan demokrasi lokal menunjukkan bahwa identitas etnis tidak lagi menjadi faktor utama yang menentukan cara masyarakat memilih. Semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, belajar tentang politik, serta mengikuti berbagai pemilihan telah membuat para pemilih lebih memperhatikan hal-hal lain, seperti riwayat kandidat, tujuan dan misi mereka, kemampuan memimpin, serta kemampuan kandidat dalam memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Kondisi itu menunjukkan perubahan cara memilih dari yang sebelumnya didominasi oleh keakraban dengan identitas, menuju pertimbangan yang lebih berdasarkan akal (Syafuan Rozy, 2021).

Sebagai contoh, fenomena ini terlihat jelas dalam konteks politik di Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Provinsi Kep. Riau, dimana menurut Databoks yakni 1,26 juta jiwa (57,87%) dari total penduduk (Fadhlurrahman, 2024). Kota Batam terkenal dengan dengan karakteristik sebagai wilayah multikultural, dimana penduduk Kota Batam terdiri dari berbagai kelompok etnis. Komposisi etnis yang terdapat di Kota Batam:

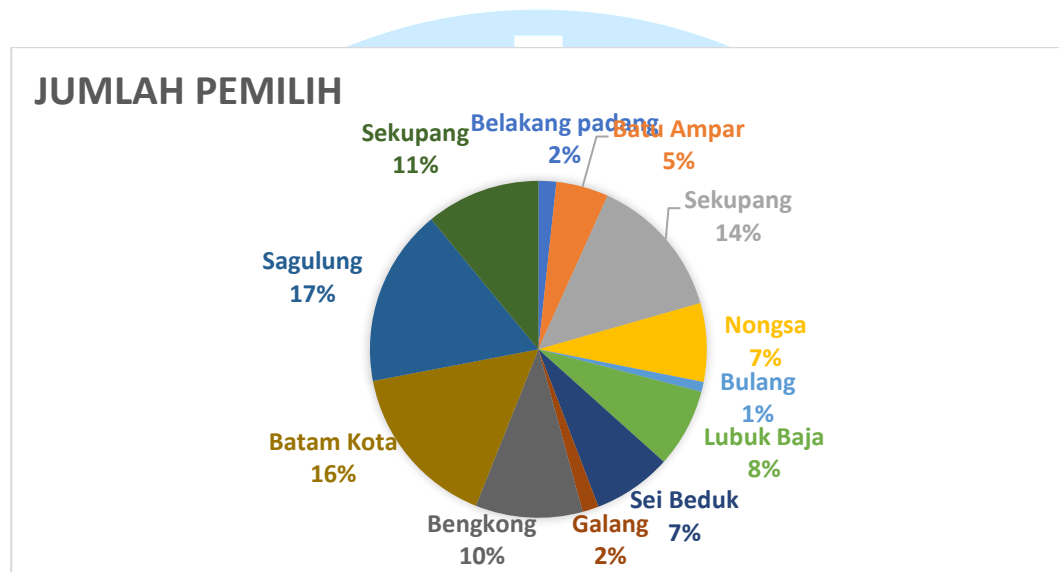
Melayu (26,78%), Jawa (17,61%), Batak 14,97%, Minangkabau 14,93%, dan Tionghoa 6,28% (Zuhri Muhammad, 2023), serta kelompok etnis lainnya termasuk komunitas dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikenal sebagai komunitas Flobamora (Flores, Sumba, Timor, dan Alor). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PK-NTT Kota Batam, Andi S Muchtar pada 2 Juni 2026 jumlah masyarakat NTT di Kota Batam diperkirakan mencapai 40.000 hingga 50.000 jiwa. Meski berstatus minoritas, komunitas NTT di Kota Batam memiliki kehadiran organisasional yang solid melalui Persatuan Keluarga Nusa Tenggara Timur (PK-NTT) yang telah berdiri sejak 25 Mei 2000.

Salah satu daerah di Kota Batam yang memiliki jumlah masyarakat terbanyak yaitu berada di Kecamatan Sagulung. Penduduk Kecamatan Sagulung pada semester 1 tahun 2024, menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu 225.144 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, 2025). Sehingga hal ini juga menyebabkan Kecamatan Sagulung menjadi kecamatan dengan jumlah pemilih terbanyak di antara kecamatan-kecamatan lain di Kota Batam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 yang berjumlah 899.666 pemilih (KPU Kota Batam, 2024). Selain itu, Kecamatan Sagulung menjadi pusat konsentrasi komunitas etnis NTT. Meskipun data resmi mengenai komposisi etnis di tingkat kecamatan belum tersedia secara publik, berdasarkan wawancara bersama Ketua KPU Kota Batam pada tanggal 13 April 2026 proporsi jumlah penduduk etnis Melayu di Kecamatan Sagulung berkisar 53.500 jiwa, Jawa sekitar 35.200 jiwa, Batak sekitar 29.900 jiwa, Minangkabau sekitar 29.800 jiwa, Tionghoa sekitar 12.500 jiwa, dan kelompok etnis lainnya sekitar 18.800 jiwa. Untuk etnis NTT di Kecamatan Sagulung diperkirakan mencapai sekitar 15.000–

27.000 jiwa, dengan catatan angka ini kemungkinan lebih tinggi mengingat Sagulung merupakan kantong utama pemukiman warga NTT di Kota Batam. Perpaduan ini menjadikan Kecamatan Sagulung sebagai arena politik yang strategis.

Gambar 1. 1 Persentase Rekap Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber: KPU Kota Batam

Kesadaran akan posisi strategis dari komunitas etnis NTT tersebut mendorong para kandidat gubernur untuk menjadikan paguyuban etnis sebagai fokus utama dalam rencana kampanye mereka. Para kandidat aktif membangun hubungan dengan PK-NTT serta komunitas Flobamora melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat NTT. Mereka memanfaatkan ruang-ruang bersama ini untuk menjalin kedekatan emosional, memperkuat legitimasi sosial, dan menampilkan diri sebagai pemimpin yang inklusif serta peka terhadap kelompok minoritas. Pendekatan seperti ini pada dasarnya bekerja pada level simbolik, dimana kandidat membangun citra penerimaan dan pengakuan terhadap kelompok etnis, namun belum menyentuh

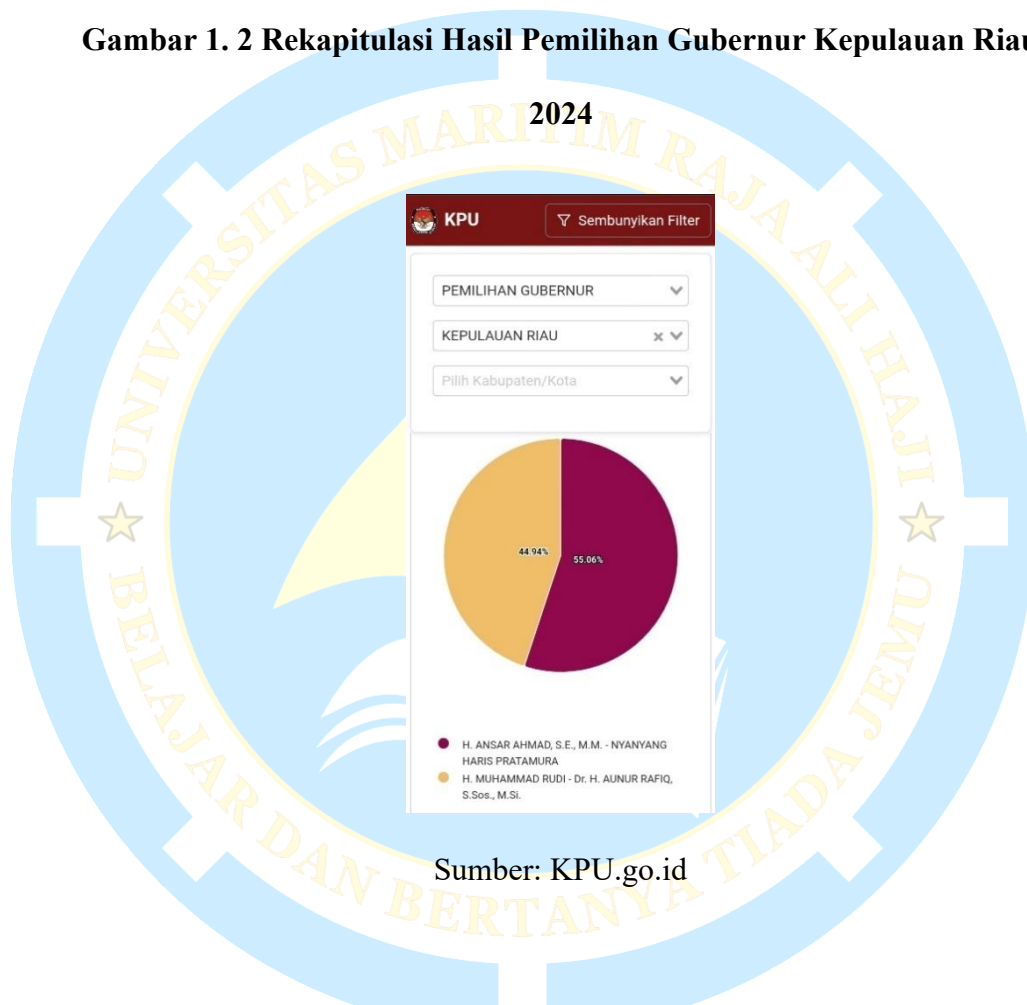
pertimbangan substantif yang sesungguhnya memengaruhi pilihan pemilih di bilik suara. Disinilah letak celah yang menjadi inti persoalan yang hendak diteliti, yaitu antara keberhasilan kampanye secara sosial dan keberhasilan secara elektoral.

Dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2024 yang diselenggarakan pada 27 November 2024, calon gubernur dengan nomor urut 02, pasangan Muhammad Rudi-Aunur Rafiq, dimana Muhammad Rudi merupakan Wali Kota Batam selama dua periode berturut-turut. Pasangan calon ini secara aktif mendekati komunitas etnis NTT di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Sagulung. Kehadiran kandidat dalam berbagai acara komunitas, seperti silaturahmi akbar Flobamora, musyawarah besar PK-NTT, serta kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan langsung warga NTT. Kehadiran kandidat 02 dalam acara-acara tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan emosional, mendapatkan pengakuan sosial dari tokoh komunitas, serta mengonsolidasikan dukungan politik berdasarkan identitas etnis. Dukungan sosial yang muncul dalam bentuk deklarasi terbuka, yel-yel komunitas, serta keterlibatan relawan NTT menunjukkan bahwa secara simbolik, kandidat telah memperoleh penerimaan yang cukup kuat dalam komunitas (Candra Gunawan, 2024).

Namun, hasil pemungutan suara mengungkap fakta yang berbeda. Secara keseluruhan, pasangan nomor urut 01 Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura memenangkan Pilkada Gubernur Kepulauan Riau 2024 dengan perolehan suara sah sebanyak 450.109 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sembilan, berbanding terbalik dengan pasangan nomor urut 02 yang hanya memperoleh suara sah sebanyak 367.367 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) (KPU Kepulauan Riau, 2024). Fakta ini menampilkan sebuah paradoks

sosiologi yang nyata ”dukungan sosial yang kuat dan terbuka selama masa kampanye tidak berkonversi menjadi dukungan suara yang sepadan pada hari pemungutan suara”. Dapat disimpulkan, terdapat perubahan perilaku yang terjadi antara dua momentum tersebut dan proses sosial di balik perubahan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Gambar 1. 2 Rekapitulasi Hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau



Meski penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara identitas etnis dan perilaku pemilih, belum ada yang secara spesifik menjawab persoalan diatas. Studi-studi yang ada memperlihatkan bahwa etnis bukan satu-satunya penentu pilihan dan pemilih semakin rasional. Sebut saja penelitian tentang etnisitas dan demokrasi lokal dalam Pilkada 2024 yang menemukan bahwa

masyarakat etnis Jawa di Desa Perkebunan Sungai Parit mengalami pergeseran perilaku politik ke arah yang lebih rasional dan mandiri, preferensi politik dalam Pilkada 2024 tidak lagi berdasar pada kedekatan tradisional tetapi mempertimbangkan program kerja, integritas calon, pengalaman nyata, dan pengaruh lingkungan sosial dan tokoh masyarakat, sehingga hal ini mencerminkan semakin matangnya demokrasi lokal (Aprianto, 2025). Selanjutnya, penelitian tentang Pengaruh Identitas Etnis pada Pilwako Medan 2020 menemukan fakta bahwa pemilih tidak hanya bergantung pada faktor etnis semata, tetapi juga mempertimbangkan kinerja, visi misi, dan perilaku kepemimpinan calon (Nasution et al., 2024). Dua temuan ini mengisyaratkan bahwa ada jarak antara dukungan sosial berbasis etnis dan pilihan aktual di bilik suara, namun belum ada studi yang secara spesifik mengkaji proses perubahan perilaku pemilih pada komunitas etnis perantauan minoritas yang telah secara terbuka mendeklarasikan dukungan pada satu kandidat, tetapi kemudian menunjukkan perilaku berbeda di bilik suara. Celah berupa proses sosial di balik kesenjangan antara dukungan sosial kampanye dan pilihan elektoral kesiniilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Fenomena ini menggambarkan adanya perbedaan antara dukungan sosial yang terlihat selama kampanye dengan dukungan suara yang diwujudkan melalui pilihan masyarakat saat pemilihan suara. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kedekatan yang dibangun tidak secara otomatis menghasilkan pilihan politik yang sama ketika masyarakat berada di bilik suara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perilaku pemilih masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh identitas etnis, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan lain yang berkembang selama proses politik berlangsung.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena terdapat tiga alasan utama. **Pertama**, Pilkada Gubernur Kepulauan Riau 2024 baru saja berlangsung, para saksi dan pelaku utamanya masih dapat ditemui untuk memberikan data primer yang kaya dan akurat sebelum konteks sosialnya memudar. **Kedua**, fenomena perubahan perilaku pemilih dalam komunitas etnis perantauan yang telah secara terbuka mendeklarasikan dukungan adalah topik yang masih jarang dikaji dalam sosiologi politik Indonesia, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*). **Ketiga**, pemahaman terhadap dinamika ini memiliki implikasi praktis; bagi aktor politik agar tidak terjebak pendekatan kampanye yang berhenti di level simbolis seremonial, serta bagi komunitas NTT agar dapat membangun partisipasi politik yang lebih sadar, substantif, dan berdaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti persoalan penelitian ini adalah terjadinya perubahan perilaku pemilih komunitas etnis NTT di Kecamatan Sagulung antara masa kampanye dan hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2024. Sehingga disusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana dinamika dukungan politik etnis NTT pada calon no urut 02 Pemilihan Gubernur tahun 2024 di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis dinamika dukungan politik komunitas etnis Nusa Tenggara Timur terhadap pasangan calon no urut 02 pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 di Kota Batam, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi terbentuk, berkembang maupun berubahnya dukungan politik selama proses pemilihan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam kajian ini sebagai sebuah studi akademik diharapkan dapat memberikan keuntungan baik dari segi teori maupun praktik dan diidentifikasi sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat baik dari sudut teori maupun praktis. Dari segi teori, penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kajian dalam bidang sosiologi politik, terutama dalam memahami bagaimana perilaku pemilih dan peran identitas etnis memengaruhi dinamika politik di tingkat lokal di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan dukungan politik di kalangan kelompok etnis minoritas, di mana dukungan sosial yang berbasis identitas tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan pemilih pada pemilu. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa depan yang ingin mempelajari hubungan antara etnisitas, strategi kampanye, dan cara berpikir pemilih dalam pemilihan kepala daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pihak politik dan tim kampanye dalam merancang strategi pendekatan yang lebih inklusif dan sesuai dengan konteks, terutama di wilayah yang memiliki masyarakat dengan karakter multietnis seperti Kota Batam. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dalam memahami bagaimana identitas etnis memengaruhi perilaku pemilih, sehingga bisa meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Bagi masyarakat, terutama masyarakat etnis NTT, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman kritis mengenai peran identitas etnis dalam proses politik, sehingga partisipasi politik tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga berdasarkan pemahaman dan kebijaksanaan.

